



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lambanan, 18 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 18 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu; sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: Susanti, S.H.. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang" beralamat di Jl. BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan domisili elektronik santiasismarhuni@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 127/SK/X/2024/PA/Blp tanggal 4 Oktober 2024; Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 Masehi, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama WALI, dikawinkan oleh imam desa yang bernama WAKIL WALI, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa sebelum perkawinan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Luwu, tanggal 04 Februari 2022;
7. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
8. Bahwa Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II sangat memerlukan isbath nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan atau penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada 12 September 2021 Masehi adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 17 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon telah memberi kuasa kepada Susanti, S.H.. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang" beralamat di Jl. BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan domisili elektronik santiasismarhuni@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 127/SK/X/2024/PA/Blp tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 12 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 10 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di rumah saksi selaku orang tua Pemohon II di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II atau suami saksi bernama WALI namun ijab qabulnya

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama WAKIL WALI, disaksikan oleh saksi-saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena waktu itu Pemohon II masih di bawah umur dan Pemohon II telah hamil lebih dulu sehingga cepat-cepat dinikahkan dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai tante Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2021 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon berlangsung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II bernama WALI namun ijab qabulnya

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama WAKIL WALI dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada Susanti, S.H.. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang" beralamat di Jl. BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan domisili elektronik

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santiasismarhuni@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 127/SK/X/2024/PA/Blp tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa, Susanti, S.H., M.H. sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kartu Tanda Anggota Peradi masih berlaku oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

artinya : *"dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: *"dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"*;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2021 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
(PNBP)		
-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp
10.000,00		
-	Panggilan Pertama Kuasa	
Pemohon		: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp
10.000,00		
2.	ATK/Proses	: Rp
100.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp
		170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

